

Volume II\Edisi 3\Tahun 2016 JUNI - AGUSTUS 2016

Majalah Internal Badilum MA RI / Tidak Diperjualbelikan



DANDAPALA

P E N J A G A K E A D I L A N

**KRITIK MASYARAKAT
MERUPAKAN
BUKTI CINTA
KEPADA
MAHKAMAH
AGUNG**



PROFIL

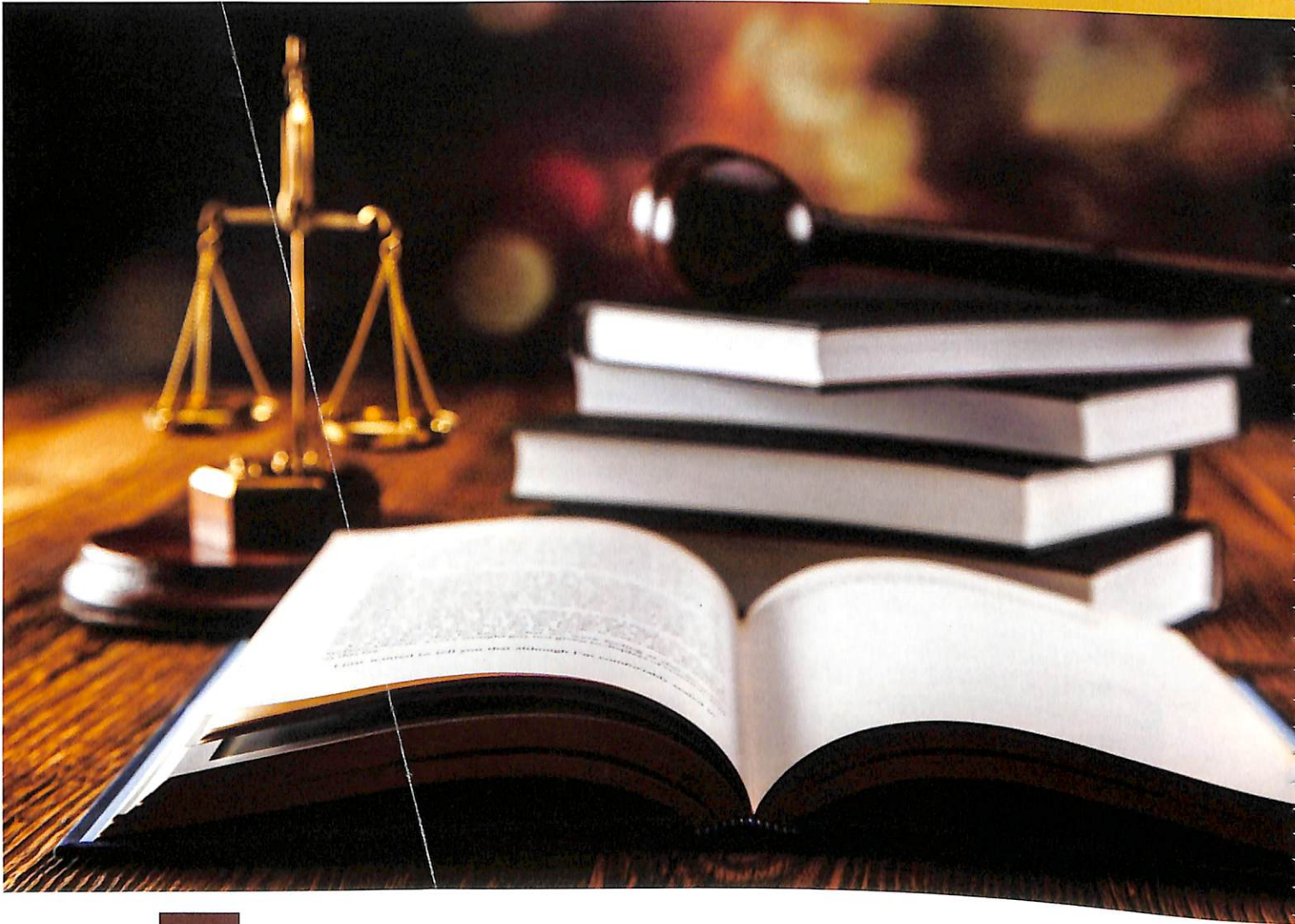
DR. H. MUH. DAMING SUNUSI, S.H., M.Hum,
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur

KOLOM

Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
Anggota Komisi Yudisial-RI

SIAPA DIA

The Biggest Voice
Suara Sang Pengadil dari Jombang



KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Oleh Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.
(Anggota Komisi Yudisial – Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi)

Etika profesi memiliki tolok ukur yang lebih fleksibel dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, etika profesi tidak membutuhkan pemberlakuan formal sebagaimana layaknya sebuah produk hukum positif. Lazimnya, etika profesi sudah dianggap mengikat apabila diterima oleh komunitas penyandang profesi tersebut.

Pelanggaran atas etika profesi, akan diproses dalam lingkup komunitas profesinya sendiri, karena asosiasi-asosiasi profesi yang sudah mapan pasti memiliki majelis kehormatan profesi tersebut yang bekerja antara lain atas dasar kode etik profesi, sebagai rumusan etika profesi yang dieksplicitkan secara tertulis dan sistematis.

HAKIM PROFESI LUHUR

Sidharta dalam bukunya: *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006) mengatakan, profesi adalah pekerjaan yang memiliki karakter khusus, yaitu: (1) mensyaratkan intelektualitas sebagai landasannya, (2) menuntut standar kualifikasi tertentu, (3) area pekerjaannya signifikan, (4) memuat unsur pengabdian kepada masyarakat, (5) mendapat penghargaan dari masyarakat, (6) memiliki organisasi profesi, dan (7) memiliki kode etik.

Dari tujuh karakter yang disebutkan di atas, ciri nomor 4 dan 5 menjadi penting untuk membedakan suatu profesi termasuk luhur (*officium nobile*) atau bukan. Hakim termasuk dalam kategori profesi luhur (mulia) karena visi-misi-tujuan dari profesi ini diabdikan untuk kepentingan kemanusiaan. Di tangan hakim, suatu tragedi kemanusiaan (perebutan harta benda, perampasan nyawa, penganiayaan, dan lain-lain) diatasi dengan memberi penguatan posisi bagi yang benar dan memberi penghukuman bagi yang salah. Inilah definisi yang paling sederhana tentang keadilan, yaitu

**Secara hukum
keperdataan, tiada
bentuk perikatan
apapun yang boleh
mengikat hakim dalam
menjalankan tugas-
tugas profesionalnya,
khususnya dengan
pihak-pihak yang
berkepentingan dalam
perkara yang sedang
ditanganinya.**

memberikan hak dan kewajiban kepada siapa yang pantas menerimanya.

Harus diakui bahwa "idealisme profesi" kerap dijadikan sasaran sinisme oleh mereka yang tidak memiliki keberanian untuk bertekad menjalankan tuntutan profesi. Orang-orang seperti ini biasanya lebih memilih sekadar "ikut arus" yang keliru sekalipun hati nurani dan akal sehatnya mengakui arus yang diikutinya itu pelan tapi pasti akan merendahkan keluhuran profesinya. Kelemahan karakter ini membuat mereka lebih tertarik pada sikap "membenarkan yang biasa" daripada "membiasakan yang benar".

Setiap profesi luhur mensyaratkan orang-orang yang kuat sebagai penyangga profesinya. Kekuatan di sini tidak bermakna secara fisik, tetapi kekuatan otonom (internal) untuk membela hati nurani dan akal sehatnya sendiri. Sebab, mereka menyadari bahwa kebahagiaan terbesar dalam kehidupan manusia akan muncul apabila kehidupan itu dijalani dengan mengikuti hati nurani dan akal sehat.



Dr. H. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.

Lebih lanjut Sidharta mengatakan, perikatan yang muncul dalam profesi luhur selalu ditandai dengan perikatan untuk mengusahakan (*inspanningsverbinten*), bukan perikatan yang menjanjikan hasil (*resultaatsverbinten*). Seorang advokat tidak seharusnya menjanjikan hasil kemenangan bagi kliennya, tetapi maksimal dapat menjanjikan usaha untuk membela kepentingan kliennya dalam mencapai keadilan. Apabila ia mengubah perikatan yang semula "menjanjikan upaya" itu menjadi "menjanjikan hasil," maka pada detik itu juga ia sudah bertindak merendahkan harkat dan martabat profesinya sendiri.

Hal yang sama tentu juga berlaku bagi profesi hakim, tetapi dalam bentuk tuntutan moral agar "perikatan" (baca: kode etik) dibuat lebih keras lagi. Sebab, secara hukum keperdataan, tiada bentuk perikatan apapun yang boleh mengikat hakim dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya, khususnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara yang sedang ditanganinya.

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Istilah "kode etik" (*code of ethics*) sering dimaknai sama dengan

tata krama (*code of conduct*) atau pedoman perilaku (*code of practice*). Di banyak profesi, kode etik disusun sendiri oleh organisasi (asosiasi) penyanggah profesi masing-masing. Dengan demikian, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), misalnya, dapat saja merumuskan sebuah kode etik untuk para anggotanya.

Penguatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam bentuk surat keputusan bersama antara dua lembaga negara sekaligus, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), dapat dipandang sebagai penggarisbawahan yang menunjukkan betapa profesi hakim ini sangat unik. Kedua lembaga ini ditugaskan oleh pembentuk undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan internal dan eksternal profesi kehakiman. Keunikan itu pertama-tama dapat diamati dari adanya jaminan-jaminan konstitusional yang melekat pada profesi hakim. Selain hakim, praktis tidak ada satu profesi hukum pun yang diberi perhatian sedemikian serius dalam konstitusi berbagai negara di dunia.

Secara kelembagaan, institusi peradilan sebagai tempat profesi hakim berkarya, dijamin independensinya. Atas dasar asumsi ini pula, putusan-putusan yang muncul dari lembaga peradilan itu selalu dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*) dan hakim-hakimnya bekerja secara imparial.

Materi muatan dalam kode etik profesi tidak sama dengan

materi muatan undang-undang. Sebab, pelanggaran etika profesi belum tentu merupakan pelanggaran hukum, namun sebaliknya pelanggaran hukum dapat dipastikan merupakan pelanggaran etika profesi. Dengan posisi ini, KEPPH dapat dipandang sebagai ketentuan otonom (*autonomic legislation*) yang secara preventif diberlakukan untuk mencegah munculnya dampak yang lebih besar jika saja perilaku hakim itu sampai bersinggungan dengan ketentuan heteronom (norma hukum positif).

**Secara hukum
keperdataan, tiada
bentuk perikatan
apapun yang boleh
mengikat hakim dalam
menjalankan tugas-
tugas profesionalnya,
khususnya dengan
pihak-pihak yang
berkepentingan dalam
perkara yang sedang
ditanganinya.**

Setiap etika profesi, apalagi yang sudah diformulasikan menjadi sebuah kode etik, seperti halnya KEPPH, mutlak membutuhkan pelembagaan (*institutionalization*), berupa penanaman ke dalam sikap dan perilaku keseharian para penyanggah profesi itu. Pelembagaan tidak seharusnya menitikberatkan pada penghukuman semata, melainkan justru pada penguatan komitmen bersama dalam menjaga harkat dan martabat kehormatan profesi.

Dalam Rakernas MA tahun 2002 di Surabaya, telah dirumuskan 10 prinsip pedoman perilaku, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang termuat dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct* dan pedoman perilaku hakim di negara-negara lain. Kemudian disempurnakan dalam Rakernas MA pada September 2006 dan disahkan dengan Keputusan KMA No.1044/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim. Pada 2012, terbit Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 02 /PB/MA /IX/2012 – 02/PB/P.KY/00/2012 tentang Panduan Penegakan KEPPH yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial, tanggal 27 September 2012 berlaku sejak tanggal penempatannya dalam Berita Negara RI.

KEPPH dimaksudkan agar hakim mengetahui dengan pasti apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukannya. Sebuah perbuatan yang apabila dilakukan oleh seseorang yang bukan hakim tidak mengundang reaksi masyarakat. Tetapi apabila dilakukan oleh seseorang hakim akan menjadi masalah yang cukup serius. Sikap dan perilaku hakim yang senantiasa menunjukkan kematangan jiwa dan emosi akan menempatkan hakim pada posisi terhormat dan keluhuran martabat.

Sebagai suatu sistem etika, pelaksanaan KEPPH diawasi oleh badan yang berwenang dengan konsekuensi sanksi atas pelanggaran. Untuk itu, pemahaman terhadap KEPPH, di

satu sisi akan menempatkan hakim dalam kehormatan dan keluhuran martabat, dan di sisi lain akan menyelamatkan hakim dari potensi sanksi yang akan dijatuhkan oleh badan yang berwenang.

Karenanya, KEPPH merupakan panduan keutamaan moral dan perilaku hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim, sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, harus memegang teguh prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) bentuk perilaku, yakni adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, dan profesional. Begitupun dalam pergaulan hidup sehari-hari sebagai individu anggota masyarakat, hakim senantiasa dituntut untuk tampil dengan perilaku tanpa cela.

SANKSI BAGI HAKIM YANG MELANGGAR KEPPH

Di dalam UU No. 18 Tahun 2011, tentang Komisi Yudisial, disebutkan salah satu tugas Komisi Yudisial (KY) adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan atas adanya dugaan pelanggaran perilaku hakim. Laporan yang ditindaklanjuti, akan dibawa ke sidang pleno yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) Anggota Komisi Yudisial untuk memutuskan terbukti atau tidaknya terlapor melanggar kode etik. Bila hakim yang dilaporkan dinyatakan tidak

bersalah melanggar kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY akan memulihkan nama baiknya dengan cara menyurati hakim yang bersangkutan yang ditembuskan kepada atasannya dan pelapor. Sebaliknya, bila hakim yang dilaporkan dinyatakan bersalah, KY akan merekomendasikan penjatuhan sanksi ke MA dengan tembusan kepada DPR. Apabila tidak terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MA, sanksi otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan. Sebaliknya apabila terjadi perbedaan pendapat antara KY dan MA tentang penjatuhan sanksi, akan dibentuk pemeriksaan bersama oleh KY dan MA. Apabila bentuk rekomendasi dari sanksi tersebut berupa pemberhentian tetap dengan hormat atau tidak

dengan hormat, dibentuk sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berdasarkan Pasal 11 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang MA dan Pasal 22 F UU No. 18/2011, tentang KY untuk memutuskan sanksi terhadap hakim yang bersangkutan, di mana Hakim yang bersangkutan diberikan kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan MKH. (BG)

(Disarikan dari Bahan Pembekalan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang disampaikan pada Pelatihan Sertifikasi Hakim (Karier-Adhoc) Tipikor Peradilan Umum dan Peradilan Militer tingkat pertama dan banding seluruh Indonesia Angkatan XVII di Mega Mendung, Bogor tanggal 9 s/d 25 Mei 2016)

